

PUBLIKASI ILMIAH

**PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN MANGROVE
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2008
TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN
(Studi di Pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya)**

OLEH :

**LUMUMBA SIANTURI,SH
A.2021131061**

Pembimbing I

Dr. H. M, Syafei SH., M.H

Pembimbing II

Hamdani, SH., M.H.um

ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of the rehabilitation of mangrove forests is based on Government Regulation No. 76 of 2008 on forest rehabilitation and reclamation (Studies in Middle Village Sepuk Betingah Island Sea Snapper Sungai Kubu Raya). From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion, that: That the rehabilitation of mangrove forests is based on Government Regulation No. 76 of 2008 on the island Betingah Middle Village sepuk marine districts snapper district stronghold highway does not work effectively due to the utilization of protected forests for businesses aquaculture does not have the legal aspect, because aquaculture is conducted in protected forest areas without first performed determination of land conversion. The responsibility of local governments on the implementation of Kubu Raya rehabilitation of mangrove forests on the island of Middle Village Sepuk Betingah Sea Snapper District of Kubu Raya is by doing Mapping Location Investment, doing counseling to the community, and doing Activity Monitoring, Control and Evaluation. Efforts should be done by the local government district highway in addressing the problems of rehabilitation of mangrove forests on the island Betingah Middle Village sepuk marine districts snapper districts camps highway among others by making various efforts to collect various data and facts, doing different cases related to the utilization of protected forest for aquaculture activities in the village of Desa Sepuk Sea snapper District of Kubu Raya, and held meetings with various agencies to resolve this problem by referring to the legislation in force, especially the rules in the field of forestry. Recommendation: in the resolution of cases the use of protected areas for aquaculture in the village Sepuk Marine District of snapper Kubu Raya, local government and law enforcement officials should not only pay attention to the normative provisions that regulate the field of forestry, but also have to see the real conditions in the field based on data and facts, and seeks to provide protection, fairness, expediency and legal certainty for local communities. The local government Kubu Raya also have to proactively seek the best solution with not ignore the rules of law which is a negative impact on preservation of the environment protected forest in the village of Sepuk Sea, by promoting various interests, including the interests of the public / fish farmers who carry out farming activities appear to be traditional .As efforts to Preserve the ecosystem of mangrove forests that have been

rehabilitated, it is suggested should be formed of local regulations regarding efforts to conserve mangrove forests binding between the people residing around the area of mangrove forest in the village of the District Sea Snapper Sepuk Kubu Raya, and prevent the destruction of mangroves from outsiders ,

ABSTRAK

Tesis ini membahas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove berdasarkan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan (Studi di Pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Bahwa pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove berdasarkan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 di pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya tidak berjalan dengan efektif dikarenakan adanya pemanfaatan hutan lindung untuk usaha budidaya tambak tidak memiliki aspek legalitas, karena usaha budidaya tambak tersebut dilakukan di kawasan hutan lindung tanpa terlebih dahulu dilakukan penetapan alih fungsi lahan. Tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya yaitu dengan melakukan Pemetaan Lokasi Penanaman, melakukan Penyuluhan kepada masyarakat, dan melakukan Kegiatan Monitoring, kontrol dan Evaluation. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten raya dalam mengatasi permasalahan rehabilitasi hutan mangrove di pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya antara lain dengan melakukan berbagai upaya dalam mengumpulkan berbagai data dan fakta, melakukan beda kasus terkait dengan pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan usaha budidaya tambak di desa Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya, dan mengadakan berbagai pertemuan dengan berbagai instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya aturan di bidang kehutanan. Rekomendasi : dalam penyelesaian kasus pemanfaatan hutan lindung untuk usaha budidaya tambak di Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya ,pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sebaiknya tidak hanya memperhatikan ketentuan normatif yang mengatur bidang kehutanan, tetapi juga harus melihat kondisi riil di lapangan berdasarkan data dan fakta yang ada, serta berupaya untuk memberikan perlindungan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat setempat. Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya juga harus proaktif mencari solusi terbaik dengan tidak mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang berdampak negatif bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup hutan lindung di Desa Sepuk Laut , dengan mengedepankan berbagai kepentingan termasuk kepentingan masyarakat/petani tambak yang melakukan kegiatan budidaya tampak secara tradisional. Sebagai upaya terjaganya kelestarian ekosistem hutan mangrove yang telah direhabilitasi, disarankan perlu dibentuk peraturan daerah mengenai upaya pelestarian hutan mangrove yang mengikat antar masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan mangrove di Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya ,dan mencegah pengrusakan mangrove dari pihak luar.

Kata Kunci: pelaksanaan, kegiatan, rehabilitasi hutan mangrove .

Latar Belakang

Desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia pada dasarnya digagas untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang semakin rusak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui sistem pemanfaatan hutan yang lestari. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan, kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan kebijakan desentralisasi bidang kehutanan dinilai oleh beberapa pihak justru menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah, karena pemerintah daerah lebih leluasa melakukan eksploitasi sumberdaya alam hutan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Masalah yuridis yang muncul adalah terjadinya ketidaksinkronan norma antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, baik semasa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berikut peraturan pelaksanaannya. Departemen Kehutanan menganggap bahwa desentralisasi kehutanan yang diatur secara terbatas berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 sudah cukup luas dan seharusnya itulah yang dijadikan acuan pengaturan desentralisasi bidang kehutanan. Tetapi, pemerintah daerah justru berpegang pada UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan sangat luas kepada daerah, terutama dalam pemberian hak pengusahaan pada hutan produksi.

Dalam kebijakan di bidang kehutanan, pembangunan kehutanan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara, memacu pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin penerimaan sebesar-besarnya bagi negara dan yang diselaraskan dengan kepentingan ekonomi dan budaya setempat dan ketersediaan hutan, dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hutan merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup, artinya pengelolaan hutan juga harus sejalan dan selaras dengan pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat hutan memberikan manfaat yang dibutuhkan manusia dan sekaligus dapat mensejahterakan masyarakat secara lestari, maka pemerintah perlu mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan bidang hutan dan kehutanan, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hutan, yang juga berarti melestarikan kualitas lingkungan hidup.

Melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya, yaitu adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksana kebijaksanaan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijaksanaan lingkungan yang telah dirumuskan pemerintah dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai dasar dan wadahnya¹.

Sumberdaya alam hutan secara alami mempunyai kemampuan regenerasi terhadap tingkat perlakuan tertentu selama eksploitasi atau permintaan pelayanan sumberdaya alam hutan berada di bawah daya regenerasinya, maka kelestarian sumberdaya alam hutan ini biasa tetap terjamin, karena sumberdaya terbaharui itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi persoalan kelestarian akan segera muncul kepermukaan ketika batas-batas daya regenerasi hutan dilampaui, karena sumberdaya itu akan mengalami kerusakan sehingga fungsi ekonomi dan fungsi ekologi akan mengalami gangguan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan. Kegiatan rehabilitasi di dalam kawasan hutan dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional sedangkan kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan dilakukan di semua lahan kritis. Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama yang terdapat di bagian hulu daerah aliran sungai. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Kerusakan sumberdaya hutan yang terjadi sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya hutan secara berlebihan yang menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan.

Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai aktifitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak dari aktifitas tersebut. Dengan kata lain wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kali dan paling banyak menerima tekanan dibandingkan dengan wilayah lain. Tekanan tersebut muncul dari aktivitas pembangunan seperti pembangunan permukiman dan aktivitas

¹ Rangkuti, Siti Sundari, 1984, *Sanksi Pidana Dalam Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya hal 231

perdagangan karena wilayah pesisir paling rentan terhadap perubahan baik secara alami ataupun fisik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah ekosistem mangrove.

Ekosistem mangrove sering disebutkan sebagai hutan payau atau hutan bakau. Ekosistem mangrove merupakan tipe hutan daerah tropis yang khas tumbuh disepanjang pantai atau muara sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak. Pengertian ekosistem mangrove secara umum adalah merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Bila dibandingkan dengan ekosistem hutan yang lain, maka ekosistem mangrove memiliki flora dan fauna yang spesifik dan memiliki keanekaragaman yang tinggi.

Kalimantan barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki ekosistem mangrove yang sangat luas di negara Indonesia. Kalimantan Barat memiliki 75% jenis mangrove yang hidup di Indonesia. Salah satu daerah penghasil mangrove terbesar di daerah ini adalah daerah Kabupaten Kubu Raya, yang mana merupakan Kabupaten yang relatif baru di Provinsi Kalimantan Barat hasil pemekaran wilayah Kabupaten Mempawah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum, jenis tanaman mangrove di Indonesia terdiri atas 202 jenis dimana 150 jenis diantaranya terdapat di Pulau Kalimantan Barat. Beberapa jenis tanaman mangrove yang dapat dijumpai dipesisir Kalimantan Barat adalah Bakau (*Rhizophora* sp.), Api-Api (*Avicennia* sp.), dari laut kearah darat secara berturut-turut, yaitu *Sonneratia* spp., *Avicennia* spp., *Rhizophora* spp., *Brugiera* spp., *Ceriops* spp., *Lumnitzera* spp., dan *Xylocarpus* spp., yang beberapa diantaranya terdapat di Provinsi Kalimantan Barat.

Dari hasil penafsiran citra satelit, diketahui bahwa pada tahun 2013, kondisi hutan mangrove di Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya sudah berupa hutan mangrove sekunder atau bekas tebangan, yaitu seluas 119.327 ha atau sekitar 0,81% dari luas Provinsi Kalimantan Barat dan hanya sekitar 34 ha yang masih merupakan hutan mangrove primer. Hutan mangrove primer yang masih tersisa di Provinsi Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Kubu Raya, baik di dalam maupun di luar kawasan. Sedangkan hutan mangrove sekunder sebagian besar terdapat di dalam kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Taman Nasional, serta di luar kawasan hutan, antara lain di kabupaten Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan sangat jelas diatur Tanggungjawab pemerintah daerah mengenai rehabilitasi hutan, yang dalam peraturan tersebut menyatakan :

Pasal 23

Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. reboisasi;
- b. pemeliharaan tanaman;
- c. pengayaan tanaman; atau
- d. penerapan teknik konservasi tanah.

Pasal 25

(1) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah untuk kawasan hutan konservasi;
- b. pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- c. pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya; atau
- d. pemegang hak atau izin untuk kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin.

(2) Sumber dana untuk melakukan pemeliharaan dibebankan kepada:

- a. Pemerintah untuk kawasan hutan konservasi;
- b. pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung;

Sehubungan dengan tanggungjawab pemerintah daerah terhadap rehabilitasi dan reklamasi hutan, pada tahun 2013 Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan program kegiatan rehabilitasi mangrove seluas 400 ha pada lokasi hutan undung di Desa Sepuk Laut Kec, Sei Kakap Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat. Program rehabilitasi mangrove adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan mangrove sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya tetap terjaga. Melalui dana DIPA 29 Balai Pengelolaan DAS Kapuas yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya.

Untuk menjaga pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Mangrove tersebut pemerintah telah melakukan pendampingan kelompok masyarakat setempat untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya fungsi hutan mangrove bagi keberlangsungan ekosistem dengan meningkatkan taraf sosial dan ekonomi yang didukung dari berbagai macam pendanaan bersifat legal dan dapat dipertanggungjawabkan dan lokasi kegiatan rehabilitasi merupakan kawasan hutan lindung yang ditetapkan melalui surat keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 259/kpts-II/2000. Yang mana kondisi faktual dilapangan saat ini kawasan tersebut telah mengalami kerusakan cukup parah akibat tambak-tambak ikan yang dikelola oleh masyarakat luar desa tersebut dan telah berjalan selama beberapa tahun.

Mengacu pada UU No 18 Tahun 2013 tanggal 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka hutan lindung mangrove di Kabupaten Kubu Raya perlu didukung oleh semua pihak terkait agar ekosistem mangrove tetap terjaga untuk melindungi dari bencana abrasi dan kerusakan lebih lanjut. BPDAS Kapuas bersama Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya sebagai pelaksana kegiatan beberapa kali telah melakukan tahapan kegiatan termasuk sosialisasi dengan masyarakat dan aparat desa setempat, dan mereka pada prinsipnya sangat mendukung kegiatan RHL tersebut.

Kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di arahkan ke kawasan hutan lindung Betingah tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap. Bermula dari temuan BPK RI pada tahun 2011 telah terjadi perambahan hutan dan mengalami kerusakan cukup parah akibat tambak-tambak ikan yang dikelola oleh masyarakat luar desa tersebut dan telah berjalan selama beberapa tahun.

Dengan adanya temuan BPK RI pada tahun 2011 bahwa telah terjadi penyerobotan kawasan hutan lindung betingan tengah untuk kegiatan tambak ikan dan

udang. Berdasarkan LHP BPK nomor 34/LHP/XVII/02/2009 BPK merekomendasikan kepada menteri kehutanan agar meminta Bupati Kubu Raya supaya memerintahkan kepada pemegang IUP dan SBI menghentikan kegiatan operasionalnya dikawasan hutan untuk menghindari kerugian negara dan atau kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Untuk memulihkan kembali kawasan hutan lindung betingah tengah desa sepauk laut kecamatan sungai kakap maka kegiatan RHL dilaksanakan pada tahun 2013. Pada saat itu pelaksanaan kegiatan banyak pemilihan tambak tidak bersedia tambak tersebut ditanami dan masih banyak penebangan kayu bahan untuk perubahan tambak baru, oleh karena itu dinas perkebunan, kehutanan dan pertambangan Kabupaten Kubu Raya melalui petugas lapangan RHL telah menyurati dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, BPDAS kapuas dan BPDAS kapuas melanjutkan kekementerian kehutanan, namun sampai sekarang belum ada tindakan dari penyidik atau aparat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penulisan tesis dengan judul: **PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN MANGROVE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN (Studi di Pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya)**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. mengapa pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove berdasarkan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 di pulau Betingah Tengah Desa sepuk laut kecamatan kakap kabupaten kubu raya tidak berjalan dengan efektif ?
2. Bagaimana tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten kubu raya terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di pulau Betingah Tengah Desa sepuk laut kecamatan kakap kabupaten kubu raya?
3. Upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten raya dalam mengatasi permasalahan p rehabilitasi hutan mangrove di pulau Betingah Tengah Desa sepuk laut kecamatan kakap kabupaten kubu raya?

Kerangka Teoretik

Untuk dapat menjelaskan, mendekati dan mengkaji masalah tesis ini digunakan konsep hukum sebagai berikut:

1. Tujuan, Fungsi dan Efektivitas Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.² Sebab, hukum bukanlah sekedar bangunan peraturan, melainkan juga bangunan “ide, kultur, dan cita-cita”, sehingga letak persoalan hukum sejatinya ada pada manusianya. Karena itu, hukum yang dibuat oleh manusia haruslah memiliki hati nurani agar semakin berguna untuk menyelesaikan persoalan manusia yang sangat kompleks dan dinamis. Jadi bukan semata-mata difokuskan untuk menyelesaikan persoalan peraturan hukum formalistik. Maka sebaiknya biarkanlah hukum itu mengalir dari dan ke ranah konteks sosiologisnya. Selain itu, hukum sebagai karya manusia, tentunya secara kongkret berisikan norma-norma perilaku, yang merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan, maka hukum itu haruslah mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat dari tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.³

Ditegaskan juga oleh Satjipto, bahwa aturan hukum haruslah dibaca secara progresif, tidak hanya terpaku mengimplementasikan ”ayat-ayat” hukum secara formalistik tanpa melihat konteks sosiologisnya. Bahkan merupakan suatu keniscayaan bagi seluruh bidang ilmu hukum untuk melihat konteks keterkaitannya dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi dan sebagainya.⁴ Di sinilah penafsiran hukum progresif menjadi sangat dibutuhkan untuk memanusiakan aturan hukum yang sangat kaku (dogmatis). Dengan cara yang demikian itu, diharapkan hukum dapat semakin berfungsi untuk memberikan kebahagiaan kepada rakyat atau bangsa dari suatu negara.⁵

Fungsi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menurut Sjachran Basah adalah :⁶

- a. Mengarahkan (memandu) jalannya tata kehidupan berpribadi, berusaha, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dicitakan menjadi kenyataan melaui penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejak awal sampai akhir.
- b. Mengintegrasikan keanekaragaman hak, kepentingan, perbuatan, dan hubungan hukum ke dalam sistem dan sub sistem hukum secara harmonis.

² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 20.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 18.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 36

⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006), Hlm. 10.

⁶ Sjachran Basah *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 13.

- c. Menstabilisasi kehidupan berpribadi, berusaha, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui proses penegakan hukum.
- d. Mengoreksi (memperbaiki) segala sesuatu yang dinilai salah, kontradiksi, ketinggalan zaman, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak adil sesuai perkembangan keadaan dan nilai-nilai yang dianggap lebih baik ke masa depan.
- e. Menyempurnakan (memperbaharui) segala sesuatu yang dianggap kurang baik, belum ada dan atau perlu diatur berdasarkan hukum bagi kepentingan subyek dan obyek hukum.

Menurut Lawrence W. Friedman, hukum sebagai suatu sistem pada dasarnya mengandung tiga komponen utama, yaitu: *Structur, Substance and Cultur*.⁷ Lebih lanjut, Esmi Warassih menjelaskannya sebagai berikut :

- (a) Komponen yang disebut dengan struktur, ialah adanya kelembagaan hukum yang diciptakan oleh hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan memberikan pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
- (b) Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para pelaksana/penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- (c) Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal cultur yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal cultur* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.⁸

Teori Lawrence M. Friedman di atas, menjelaskan betapa pentingnya komponen struktur, substansi dan kultur dalam suatu sistem hukum. Ketiga komponen itulah sebenarnya yang menjadi kunci penentu apakah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan atas hukum di dalam suatu negara hukum, dapat dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuannya. Karena itu, pembangunan struktur, substansi dan kultur hukum dalam suatu negara hukum haruslah dilakukan secara silmutan, saling bersinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

⁷ Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, P. 1-8. Lihat pula *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, P. 1002-1010 dan dalam *Law in America: a Short History*, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, P. 4-7.

⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005, Hlm. 81-82.

Jika hanya terfokus pada pembangunan struktur hukum, tanpa diimbangi dengan pembangunan substansi dan kultur hukum, maka bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat akan menjadi timpang, bersitegang atau sarat dengan berbagai kesenjangan antara norma abstrak dengan perilaku kongkret.

Secara sosiologis, pembangunan struktur hukum juga tidak lepas kaitannya dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, terutama menyangkut moralitas, kompetensi, profesionalitas, dan integritas dari badan-badan pemerintahan dan aparaturnya penegak hukum. Ini terkait dengan aspek kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya pemerintah dalam melaksanakan ketentuan hukum, aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum dan tegaknya supremasi hukum.

Meskipun prasarana dan sarana penegakan hukum dapat disediakan secara lengkap baik kuantitas maupun kualitasnya, namun jika aspek moralitas, kompetensi, profesionalitas, dan integritas dari aparaturnya pemerintah dan penegak hukum tidak dibangun secara utuh, maka proses bekerjanya hukum untuk mencapai tujuannya akan menimbulkan berbagai ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidakmanfaatan. Sehingga hukum hanya sebagai bayang-bayang saja dari kekuasaan yang cenderung bersifat korup.

Demikian pula dengan pembangunan substansi hukum, wawasan pemikirannya haruslah dikorespondensikan dengan paradigma pemikiran sosiologis agar bersesuaian dengan nilai-nilai, kebutuhan dan kondisi riil masyarakat yang diaturnya. Jika, hanya mengandalkan pemikiran hukum legal positivistik (dogmatis), apalagi atas dasar kehendak penguasa, maka bangunan hukum yang mengedepan bukanlah hukum yang memberdayakan masyarakat, melainkan hukum memperdayakan masyarakat.

Terlebih khusus untuk membangun kultur hukum dalam bentuk kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, baik oleh aparaturnya penegak hukum maupun anggota masyarakat. Kesemuanya itu, tidak bisa digarap hanya dengan cara-cara paksaan hukum (kekuasaan) semata, melainkan harus dikelola secara arif disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

2. Konsep Pembangunan

Coralie Bryant dan Loise G. White, dua orang pakar administrasi pembangunan mendeskripsikan, bahwa konsep pembangunan itu mengandung pengertian “menjadi”

(*being*) dan “mengerjakan” (*doing*).⁹ Kegiatan mengerjakan dan membuat jadi dalam konteks makna pembangunan, terarah pada upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup manusia di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dengan partisipasi aktif rakyat untuk mewujudkan tujuan negara ke masa depan yang lebih baik secara berkeadilan (*equity*), memberdayakan (*empowerment*), dan berkesinambungan (*sustainability*). Karenanya, operasionalisasi penyelenggaraan pembangunan memerlukan Sistem Manajemen Pembangunan yang bermutu dari tingkat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, sampai ke tingkat umpan balik (*feed back*).

Konsep pembangunan (*development*) dan modernisasi (*modernization*) kerap kali disetarakan pengertiannya dengan perubahan sosial, pembaharuan, pertumbuhan dan industrialisasi. Elemen-elemen pokok dari teori modernisasi mensinergikan upaya perubahan tata ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang dilakukan dengan cara-cara yang “revolusioner, terencana, sistematis, global, bertahap, homogenisasi (*convergence*), progresif, berkelanjutan, ekspansionis, dan kapitalisme”.¹⁰

Di Indonesia pembangunan nasional (termasuk pembangunan bidang kehutanan) dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional berbasis pada nilai-nilai Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.

Sejalan dengan konsep pembangunan di atas, W. Friedmann, menjelaskan fungsi negara dalam paham negara kesejahteraan adalah ikut campur tangan dalam bidang perekonomian, baik sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan rakyat, pengatur (*regulator*), pengusaha (*entrepreneur*) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sebagai wasit/pengawas (*umpire*) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (*state corporation*).¹¹

Pandangan tentang fungsi negara tersebut juga bersesuaian dengan konsep hukum sebagai “*social engineering*” dicetuskan oleh Roscoe Pound dalam karangannya berjudul “*Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*” (1912).¹² Menurut Pound untuk

⁹Coralie Bryant dan Loise G. White, Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta, 1987, Hlm. 21

¹⁰Mansaur Fakhri, Tradisi dan Pembangunan Suatu Tinjauan Kritis, dimuat dalam majalah CSIS, Tahun XXIV, No. 6, 1985, Jakarta, Hlm. 440-448

¹¹Wolfgang Friedmann, *The State and The Rule of Law in a Mix Economy*, Steven and Son, London, 1971, Hlm. 3

¹²Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, Hlm. 298

membangun suatu masyarakat yang secara maksimum mampu mencapai kepuasan akan kebutuhan-kebutuhannya, dengan seminimum mungkin benturan dan pemborosan; maka hukum perlu disusun sejumlah kepentingan yang wajib dilindungi oleh hukum. Pound membagi kepentingan-kepentingan di dalam kehidupan bermasyarakat atas tiga golongan utama, yaitu :¹³

1. Kepentingan umum :
 - (a) kepentingan terhadap negara sebagai badan yuridis;
 - (b) kepentingan terhadap negara sebagai penjaga dari kepentingan sosial;
2. Kepentingan perseorangan :
 - (a) pribadi (fisik, kebebasan kemauan, kehormatan, privacy, dan kepercayaan serta pendapat);
 - (b) hubungan-hubungan domestik (orang tua, anak, suami-isteri);
 - (c) kepentingan substansial (milik, kontrak dan berusaha, keuntungan, pekerjaan, hubungan dengan orang lain);
3. Kepentingan sosial meliputi :
 - (a) keamanan umum;
 - (b) keamanan dan institusi-institusi sosial;
 - (c) moral umum;
 - (d) pengamanan sumber-sumber daya sosial;
 - (e) kemajuan sosial;
 - (f) kehidupan individual (pernyataan diri, kesempatan dan kondisi kehidupan).

Selanjutnya Pound juga menyusun postulat-postulat hukum dalam suatu masyarakat beradab, bahwa :¹⁴

- (1) setiap orang tidak akan melakukan serangan yang disengaja kepada individu lainnya;
- (2) setiap orang bisa menguasai apa yang mereka dapat untuk tujuan-tujuan yang menguntungkan dan menggunakannya untuk pemanfaatan mereka sendiri, apa yang mereka capai melalui kerja sendiri dan dalam rangka tatanan sosial serta ekonomi yang ada;
- (3) setiap orang yang mengadakan hubungan sosial akan bertindak dengan itikad baik, karena : (a) memenuhi apa yang mereka harapkan; (b) melakukan usaha-usahnya sesuai dengan yang diharapkan dan dengan sentimen masyarakat; (c) memperbaiki kembali apa yang tidak semestinya diterima;

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

- (4) setiap orang yang berhubungan akan bertingkah laku penuh kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya.

Diilhami oleh konsep Pound tentang “*law as a tool of social engineering*” dan pendekatan filsafat budaya dari Northrop serta pendekatan “*policy oriented*” dari Laswell dan Mc. Dougal; maka Mochtar Kusumaatmadja mencetuskan konsep hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “sarana pembangunan” untuk kondisi Indonesia dengan ciri pokok sebagai berikut :¹⁵

- (1) Lebih menonjolkan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi juga memegang peranan. Ini berlainan dengan di Amerika Serikat di mana teori Pound itu ditujukan terutama pada peranan pembaharuan keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan Mahkamah Agung (*Supreme Court*);
- (2) Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat untuk menolak aplikasi “*mechanistic*” dan individualitis dari konsep “*law as a tool social engineering*”, karena kata “*tool*” hakikatnya tidak jauh berbeda hasilnya dengan penerapan “legisme” oleh Belanda yang bertujuan mematikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adat Indonesia.

Konsep hukum sebagai sarana pembangunan atau perubahan masyarakat di atas sangat relevan dengan perkembangan (reformasi) otonomi daerah di Indonesia, khususnya desentralisasi bidang kehutanan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagaimana diatur terakhir dengan UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 2007.

3. Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 huruf butir 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan “Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kewenangan itu baru ada apabila ada penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan kewenangan ini secara konseptual disebut “desentralisasi”.¹⁶

¹⁵Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1986, Hlm. 9

¹⁶Lihat pula Pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan tidak hanya dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, melainkan juga berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.¹⁷ Sedangkan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.¹⁸

Ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan itu, berkorelasi dengan ajaran rumah tangga daerah, yaitu: ¹⁹

- a. Sistem ajaran rumah tangga material (*Materiel huishoudijgsbegrip*) atau disebut juga pembatasan otonomi secara limitatif (*zakelijke afbakening*) menekankan agar pemberian kewenangan dan urusan kepada Daerah ditentukan dengan tegas, jelas dan limitatif dalam undang-undang tentang pembentukan Daerah Otonom yang bersangkutan. Kebaikan sistem ajaran rumah tangga materiil terletak pada adanya kepastian hukum mengenai besar kecilnya atau luas sempitnya urusan otonomi yang diserahkan kepada Daerah. Kelemahannya, dalam praktek pengaturan memang cukup sukar merincikan secara limitatif kewenangan dan urusan-urusan Pemerintahan yang selayaknya diserahkan kepada Daerah.
- b. Sistem ajaran rumah tangga formal atau disebut juga dengan pembatasan otonomi menurut asas tertib tingkat (*afbakening volgens het rangordebeginsel* atau *hierarchise taak afbakening*), hanya menentukan secara umum tentang urusan Pemerintahan yang akan diserahkan kepada Daerah. Selain itu membuka ruang inisiatif kepada Daerah untuk menggali, mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum.
- c. Sistem ajaran rumah tangga riil (nyata), yang menghendaki agar penyerahan otonomi kepada Daerah didasarkan pada kondisi riil bahwa suatu urusan memang layak menjadi urusan Daerah serta kemampuan nyata dari Pemerintah Daerah Otonom untuk melaksanakannya. Kemampuan ini terkait dengan ketersediaan sumber daya

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 butir 8.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 butir 9.

¹⁹ Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hlm. 96.

keuangan, sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan potensi pendukung lainnya yang dimiliki oleh Daerah.

Amrah Muslimin berpendapat: “...pemberian wewenang kepada badan atau golongan di dalam masyarakat untuk mengurus rumah tangganya secara otonom, disebut desentralisasi”.²⁰ Berdasarkan pembatasannya itu, Amrah Muslimin membedakan desentralisasi ke dalam tiga tipologi, yakni: desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan.

Desentralisasi politik diartikannya sebagai pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada badan-badan politik di daerah untuk mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri. Tipe desentralisasi ini biasanya disebut juga “Desentralisasi Teritorial” karena pemberian wewenang dijemakan ke dalam badan-badan Pemerintah Daerah Otonom menurut lingkup teritorial (*gebiedscorporaties*).

Sebaliknya desentralisasi fungsional merupakan pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada badan-badan Pemerintah Daerah Otonom atas dasar urgensi tujuannya (*doelcorporaties*). Umpamanya penyerahan sebagian kewenangan di bidang kepegawaian yang diperbantukan kepada Daerah ataupun pemberian kewenangan-kewenangan tertentu lainnya yang dianggap lebih efisien jika diserahkan kepada Daerah. Sedangkan desentralisasi kebudayaan, adalah memberikan hak kepada golongan-golongan masyarakat tertentu untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri seperti pendidikan agama, adat istiadat, atau nilai-nilai sosial budaya masyarakat di Daerah yang bersifat khas.

Irawan Soejito, membedakan desentralisasi atas tiga tipologi, yaitu: desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional dan desentralisasi administratif.²¹ Pengertian *desentralisasi teritorial* sama maknanya dengan konsep *desentralisasi politik* yang diketengahkan oleh Amrah Muslimin, begitu pun dengan desentralisasi fungsional. Tentang desentralisasi administratif, pengertiannya diidentikkan dengan “dekonsentrasi” (*ambtelijke decentralisatie*), ialah: pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada perangkat-perangkatnya wilayahnya di Daerah.²²

Kemudian R. Tresna, membedakan desentralisasi ke dalam dua tipologi pokok. Pertama, *ambtelijke decentralisatie* yang disebut juga dekonsentrasi. Kedua,

²⁰ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1978*, Alumni, Bandung, 1978, Hlm. 15.

²¹ Irawan Soejito, *Op. Cit.*, Hlm. 29.

²² Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, 1990, UNPAD, Hlm. 17-22.

staatkundige decentralisatie yang terbagi menjadi *territoriale decentralisatie* dan *functionale decentralisatie*.²³

Menurut Pasal 1 butir 7 UU No. 32 tahun 2004 menyatakan : "Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia".

Pengertian desentralisasi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 di atas hakikatnya tidak berbeda secara prinsipil dengan konsep desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh para pakar yang konsepsinya telah ditampilkan terdahulu. Maka sekalipun UU No. 32 tahun 2004 tidak membedakan secara tegas jenis desentralisasi apa yang dianutnya, tetapi menurut pendapat penulis pengertian desentralisasi yang dikandungnya dapat dikategorikan sebagai desentralisasi teritorial atau desentralisasi politik karena bersesuaian terutama dengan konsepsi yang dikemukakan oleh Amrah Muslimin.

Dari uraian ketiga pakar di atas, menunjukkan kewenangan dan urusan dekonsentrasi secara faktual dilimpahkan kepada perangkat-perangkat Pemerintah Pusat di Daerah seperti: Kantor Wilayah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Instansi Vertikal lainnya di Daerah. Sebaliknya, kewenangan dan urusan desentralisasi teritorial maupun fungsional diserahkan kepada Pemerintah Daerah Otonom menjadi urusan rumah tangganya sendiri, baik menyangkut aspek perencanaan, organisasi, administrasi, keuangan, maupun pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004, pengaturan desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional berada sepenuhnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan meniadakan desentralisasi administratif (dekonsentrasi), sedangkan pada Daerah Propinsi masih diterapkan desentralisasi teritorial dan fungsional secara terbatas serta desentralisasi administratif seutuhnya.

Desentralisasi administratif seutuhnya yang juga disebut dekonsentrasi, berdasarkan Pasal 1 butir 8 UU No. 32 tahun 2004 dirumuskan dengan pengertian: "... pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu". Pengertian dekonsentrasi yang demikian, tidak berbeda dengan konsepsi yang dikemukakan oleh para pakar di atas. Hanya saja ada pembatasan yaitu dilimpahkan kepada Gubernur atau perangkat Pemerintah Pusat yang ada di Daerah Provinsi, bukan kepada Bupati/Walikota.

²³ R. Tresna, Bertamasya Ke Taman Ketatanegaraan, Dibya, Bandung, tt, Hlm. 31.

Di antara kedua asas desentralisasi dan dekonsentrasi, diselipkan asas medebewind atau tugas pembantuan. Tugas ini konsepsi dasarnya diartikan sebagai “tugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah” (*de uitvoering van hogere regelingen*).²⁴

Menurut Bagir Manan,²⁵ secara konsepsional, tugas pembantuan sesungguhnya merupakan bagian dari konsep desentralisasi yang menjadi terminal awal menuju penyerahan urusan dan kewenangan secara penuh menjadi urusan otonomi Daerah.

Selain itu, Bagir Manan juga berpendapat, bahwa pengaturan otonomi daerah dan hubungannya dengan Pemerintah Pusat haruslah dilakukan dengan taat asas menurut prinsip-prinsip: Demokratisasi, Ikatan Negara Kesatuan, Kepastian Hukum, Pemencaran Kekuasaan, dan Implementasi Tujuan Negara :²⁶

Prinsip demokratisasi dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia landasan filosofinya mengacu pada sila keempat Pancasila ialah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Prinsip ikatan Negara Kesatuan, mewajibkan pembentukan Pemerintahan Otonom maupun Administratif tidak boleh bersifat negara di dalam negara. Pemerintah Daerah Otonom tetap harus tunduk pada ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip kepastian hukum, yakni pengaturan yang tegas, jelas, tertib, benar, dan adil dengan peraturan perundang-undangan dari tingkatan tertinggi sampai terendah melalui lembaga pembentuk hukum yang berwenang untuk itu.

Prinsip pemencaran kekuasaan dalam bentuk pembagian wewenang, tugas, fungsi, urusan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur secara tegas dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan guna mengimplemetasikan asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

Prinsip mewujudkan tujuan negara, sebagaimana termaktub pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 merupakan kunci pembimbing tujuan pembentukan otonomi daerah. Bahwa pada akhirnya Negara Kesatuanlah yang berdaulat seutuhnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pro aktif dalam perdamaian dunia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

²⁴Bagir Manan, *Op. Cit.* Hlm. 259.

²⁵Bagir Manan, *Ibid.*

²⁶Bagir Manan, *Ibid.* Hlm. 232-247.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,²⁷ melalui studi kepustakaan dan metode penelitian sosiologis melalui studi lapangan sebagai pelengkap :

28

1. Studi Kepustakaan

1.1. Sumber Data :

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian ;
- b. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang terkait dengan masalah penelitian;
- c. Bahan hukum tertier berupa kamus hukum, kamus bahasa, kamus pemerintahan, dan dokumen tertulis lainnya.

1.2. Teknik Pengumpulan Data : dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari, mengkaji, dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas dan norma-norma hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier ke substansi masalah penelitian.

1.3. Teknik Analisa Data : dilakukan dengan metode deskriptif yuridis, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah yang diteliti.

2. Studi lapangan :

2.1. Dilakukan dengan penetapan populasi dan sampel :

- a. Populasi terdiri unsur Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Sampel ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) terdiri atas :
 - 1) Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 - 2) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
 - 3) Biro Hukum Pemerintah Daerah Kubu Raya.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, , *Penelitian Hukum Normatif* , Suatu Tinjauan Singkat., Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm.13-14. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, Hlm. 147, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal. Demikian pula menurut Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hlm. 10.

²⁸ Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif, Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op. Cit.*, Hlm. 14.

4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kubu Raya.

1.2. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang disusun dengan pertanyaan/jawaban terbuka.

1.3. Teknik analisa data : dilakukan dengan metode deskriptif yuridis (kualitatif).

Pembahasan

Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Mangrove Di Pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya

a. Tanggungjawab Pemerintah dalam Pemetaan Lokasi Penanaman

Sebelum pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan, dibutuhkan perencanaan awal terhadap identifikasi lahan yang akan direhabilitasi. Dalam pasal 35 ayat 2 (dua) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan sudah jelas diatur tentang kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kota/kabupaten untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan. Untuk melakukan rehabilitasi hutan mangrove Di Pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan identifikasi lahan. Rancangan yang dilakukan pemerintah dalam memetakan lahan yang akan direhabilitasi berdasarkan tata letak penanaman antara lain: luas dan letak calon lokasi penanaman, pembagian petak tanaman, luas dan letak calon lokasi persemaian, luas dan letak calon lokasi *base camp* dan letak saluran air. Pemetaan lokasi ini sangat penting untuk menunjang kegiatan rehabilitasi dilakukan, di samping untuk menghindari konflik di masyarakat oleh penggunaan lahan yang digunakan untuk persiapan sampai selesainya kegiatan rehabilitasi, juga dilakukan untuk menginformasikan lahan-lahan yang telah direhabilitasi. Hal ini telah disesuaikan dengan panduan yang menyatakan bahwa pemetaan lokasi dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi lahan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk melakukan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove sebelum dilakukannya rancangan teknis kegiatan.

2. Tanggungjawab Pemerintah dalam Pendanaan

Berdasarkan jumlah pendanaan yang digunakan untuk kegiatan reboisasi hutan mangrove mulai tahun 2013 dengan luas 400 ha di Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya yaitu sebesar Rp. 3.551.689.00,- yang bersumber dari

anggaran APBN tahun 2013. Dalam pasal 25 ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan sudah diatur mengenai sumber dana tentang rehabilitasi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan responden dari salah satu instansi pemerintahan, biasanya bentuk pendanaan yang dilakukan pemerintah adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengadaan bibit dengan hitungan nilai uangnya dalam satuan bibit. Jumlah harga satuan bibit tidak dapat disamakan pada setiap proyek yang dijalankan. Biaya tersebut tergantung jumlah dana yang ada dan kondisi lahan yang dikerjakan. Jika dana yang ada dalam jumlah besar, maka bibit mangrove tersebut akan dilakukan melalui program tender kepada pengusaha. Namun jika sebaliknya, maka pengadaan bibit dari masyarakat akan dihitung persatuannya.

Keterlibatan pemerintah dalam pendanaan ini, bukanlah sepenuhnya bersumber dari pemerintah. Dana untuk rehabilitasi ini, berasal dari bantuan LSM yang memiliki program rehabilitasi hutan mangrove dan bersama pemerintah mengorganisir dan merealisasikan dana rehabilitasi dengan keterlibatan masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh gunawan bahwa dalam hal pengusulan dana, pemerintah dan kelompok petani mangrove tidak pernah mengusulkan dana. Namun kegiatan rehabilitasi yang sedang berjalan ini merupakan kesadaran dari pihak LSM pemerhati lingkungan yang mengalokasikan dananya untuk rehabilitasi hutan mangrove melalui dukungan pemerintah dalam memenuhi kelengkapan administrasinya dan sampai saat ini pengalokasian dana sudah sangat baik dan tepat sasaran dilakukan²⁹.

Hasil temuan di lapangan, pemerintah melakukan program rehabilitasi hutan mangrove dengan pendekatan pendanaan proyek dengan prinsip 30 persen dana diberikan kepada kelompok masyarakat pada saat kesepakatan jumlah bibit mangrove yang akan dikelola disetujui dan 40 persen dana diberikan kemudian saat berlangsungnya kegiatan pembibitan dilaksanakan dan 30 persen sisa dana dari 100 persen diberikan setelah selesainya program rehabilitasi yang disepakati. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi tersebut merupakan aktivitas proyek mencari keuntungan semata. Pada akhirnya setelah proyek selesai dan dana yang dialokasikan untuk kesepakatan rehabilitasi tersebut telah habis, maka proyek

²⁹ Wawancara dengan bapak gunawan (warga desa sepuk laut kecamatan kakap kabupaten kubu raya)

dinyatakan telah selesai tanpa memperhatikan kelanjutan keberhasilan proyek beberapa waktu kemudian oleh karena pendanaan telah habis.

Pembiayaan program atau proyek rehabilitasi hutan dan lahan mangrove yang dilakukan sepenuhnya diketahui pelaksana kegiatan tidaklah bersifat perencanaan dari bawah atau *bottom up*. Pendanaan ini diperoleh berdasarkan anggaran yang disusun Pemerintah yang didasarkan atas kebutuhan perencanaan rehabilitasi yang bersumber dari rancangan masyarakat.

3. Tanggungjawab Pemerintah dalam Penyuluhan

Dalam pasal 34 ayat 1 (satu) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan sudah diatur mengenai penyuluhan tersebut. Penyuluhan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penjelasan dan pengertian kepada masyarakat mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove yang diprogramkan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan sekaligus pengertian dan pemahaman kepada masyarakat, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang baik dan dapat mendukung kelancaran program rehabilitasi hutan mangrove tersebut melalui partisipasi yang positif.

Berdasarkan pantauan berkas administrasi kegiatan pemerintah, penyuluhan dilakukan pada saat akan dimulainya program rehabilitasi hutan mangrove baik yang dilaksanakan pemerintah maupun LSM . Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Feri yang menyatakan bahwa ³⁰sebelum kegiatan rehabilitasi hutan mangrove dimulai atau dilaksanakan, terlebih dahulu masyarakat kelompok tani diberikan penyuluhan dan beberapa pelatihan teknik budidaya tanaman mangrove.

Selanjutnya penyuluhan ini diberikan secara berkala selama program rehabilitasi berlangsung atau sampai pada tahap pemeliharaan bibit mangrove yang telah ditanam. Penyuluhan ini dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Rehabilitasi Hutan Lindung yang di tunjuk oleh Kepala Balai Pengelolaan DAS Kapuas Nomor SK.152/BPDAS.KP/2013 dan Surat Keputusan Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya Nomor 55 tahun 2013 tentang Penetapan dan Penempatan Petugas RHL (PL-RHL) Desa Sepuk laut kecamatan kakap kabupaten kubu raya.

³⁰ Wawancara penulis dengan salah satu LSM pemerhati Lingkungan di desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya

Penyuluhan ini dilakukan baik secara formal maupun tidak formal. Penyuluhan yang dilakukan secara formal dengan mengundang masyarakat melalui surat resmi dan penyelenggaraannya diatur pada tempat tertentu dan melibatkan masyarakat yang banyak. Penyuluhan formal ini umumnya telah ditentukan topik yang akan dibicarakan, seperti metode pembibitan, metode penanaman atau penyampaian format laporan pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove kepada kelompok masyarakat yang memperoleh dana bantuan program rehabilitasi tersebut. Penyuluhan tidak formal dengan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat yang menjalankan program rehabilitasi hutan mangrove dimulai dari aktivitas pembibitan, penanaman sampai kepada pemeliharaan baik secara kelompok maupun perseorangan di wilayah kerja pelaku kegiatan.

4. Tanggungjawab Pemerintah dalam Kegiatan Monitoring, Control dan Evaluation

Hingga saat ini, tingkat keberhasilan rehabilitasi masih belum diketahui secara pasti karena terbatasnya data dan informasi mengenai persentase jumlah tanaman yang hidup. Hanya sebahagian kecil diantara pelaksana saja yang memiliki data tentang kemajuan kegiatan rehabilitasi, termasuk persentase hidup di lapangan. Sementara, sebagian besar pelaksana kegiatan tidak melakukan kegiatan *monitoring*, *control* dan *evaluation* yang menyebabkan data pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove yang telah dilakukan tidak diketahui. Pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove dilakukan seyogyanya dengan adanya proses *monitoring*, *control* dan *evaluation*. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan rehabilitasi hutan mangrove yang dilakukan. Sebagaimana dinyatakan Departemen Kelautan dan Perikanan (2004) bahwa pengelolaan ekosistem mangrove mengikuti proses berulang melalui kegiatan *monitoring*, *control* dan *evaluation* untuk tercapainya suatu keberhasilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas instansi pemerintah, menyatakan bahwa pelaksanaan *monitoring*, *control* dan *evaluation* dilakukan masing-masing lembaga pelaksana program kegiatan untuk setiap wilayahnya. Pihak pemerintah langsung turun ke lapangan untuk melihat proses kegiatan rehabilitasi yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Kegiatan *monitoring*, *control* dan *evaluation* ini dilakukan sebagai dasar

pertanggungjawaban pengalokasian dana yang digunakan untuk rehabilitasi tersebut yang pada akhirnya dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Arif yang menyatakan Pelaksanaan *monitoring*, *control* dan *evaluation* dilakukan untuk mencapai hasil rehabilitasi hutan mangrove yang baik. Proses *monitoring* dilakukan setiap awal bulan, proses *control* dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan yakni mengamati tingkat persentase tumbuh tanaman sedangkan proses *evaluation* dilakuakn pada akhir kegiatan³¹.

Lembaga Swadaya Masyarakat menjalankan aktivitas *monitoring*, *control* dan terhadap hasil kegiatan rehabilitasi kepada Pemerintah sehingga pelaksanaannya harus dilakukan. Hal ini disebabkan adanya perjanjian atau kesepakatan kepada pemerintah untuk penggunaan dana sampai pada keberhasilan. Demikian juga pemerintah, kegiatan *monitoring*, *control* dan *evaluation* dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengalokasian dana yang dipergunakan untuk program rehabilitasi hutan mangrove dari pemerintah pusat.

Upaya-Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raya Dalam Mengatasi Permasalah Rehabilitasi Hutan Mangrove Di Pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya

Pada tujuan pembentukan hukum dalam kenyataannya, apakah itu Undang-undang atau peraturan lainnya, di mana di dalamnya terdapat konsep pengaruh positif atau tingkat keberhasilan yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Untuk melihat apakah perangkat hukum atau peraturan yang berlaku itu berhasil atau gagal mencapai tujuannya tergantung pada pengaruhnya dalam mengatur sikap atau perilaku tertentu dari warga masyarakat sesuai dengan tujuan tertentu dari hukum atau peraturan yang bersangkutan. Upaya-upaya yang ditempuh agar hukum itu cenderung efektif dan sekaligus agar warga masyarakat mematuhi kaidah hukum sehingga perilaku manusia di dalam masyarakat dapat cocok dengan segala yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka hal ini menurut Soetandyo Wignyosoebroto ditentukan oleh beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum ditangkap dan dipahami.
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan itu.

³¹ Wawancara dengan dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu raya

3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan antara lain :
 - a. Aparat administrasi yang menyadari kewajiban untuk melibatkan diri ke dalam usaha mobilisasi aturan-aturan hukum.
 - b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak mudah dihubungi dan dimasuki oleh warga masyarakat akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa itu.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum memang sesungguhnya berdaya kemampuan efektif.

Dari contoh kasus yang terjadi di desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya di atas tergambar bahwa masyarakat/petani yang melakukan kegiatan usaha budidaya tambak di kawasan hutan lindung Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dapat dikenakan sanksi baik berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan/atau sanksi dalam Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian terhadap pemanfaatan hutan lindung untuk budidaya tambak di desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, dan penyelesaiannya menjadi kompleks, apalagi ditambah dengan berbagai data dan fakta yang menyatakan:

1. Tidak pernah ada pemberitahuan/penyuluhan/sosialisasi secara resmi tentang status hutan lindung desa Sepuk Laut,
2. Ada sebagian tambak yang sebelumnya bekas pohon kelapa/kebun kelapa, dan bahkan sampai sekarang masih ada tunggul kelapanya,
3. Masyarakat/nelayan/petani tambak memiliki/ membuka tambak sejak/sekitar tahun 1991,
4. Ada sebagian petani tambak yang telah mendapat ijin usaha budidaya tambak dari Dinas Kelautan dan Perikanan,
5. Masyarakat membuka tambak secara gotong royong (iuran mendatangkan alat berat) untuk membuat tanggul,
6. Masyarakat yang punya tambak lebih kurang 60 orang,

7. Tambak masyarakat pada umumnya dikelola secara tradisional, tiap hari diberi makan runcah, kemudian setelah tiga bulan di panen,
8. Biaya untuk budidaya tambak antara lain untuk runcah, kapur (untuk pertama kali), saponen (semacam racun untuk membunuh anak ikan), bibit udang/ikan,
9. Semenjak harga minyak naik sekitar tahun 1998, tidak ada lagi masyarakat yang membuat tambak, hanya melanjutkan tambak yang ada.³².

Berdasarkan uraian di atas berarti bahwa tidak hanya masyarakat/petani tambak saja yang dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi juga kalangan pemilik modal, dan pejabat pemberi ijin budidaya tambak. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan hutan lindung untuk budidaya tambak berarti erat kaitannya dengan konsep perilaku. Konsep perilaku dapat dikategorikan ke dalam dua golongan utama, yaitu perilaku standar dan perilaku menyimpang. Perilaku standar ialah segala perilaku dan perbuatan manusia dalam proses interaksi sosial bersesuaian dengan nilai-nilai, norma-norma atau patokan-patokan berperilaku yang ditentukan dan berlaku dalam tata kehidupan berpribadi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebaliknya perilaku menyimpang ialah, semua sikap dan perbuatan manusia yang berlawanan, bertentangan, dan menyimpang dari nilai-nilai, norma-norma dan patokan-patokan yang ditentukan dan berlaku untuk itu. Di bidang kehidupan hukum, perilaku hukum sebagai perilaku standar utamanya berwujud sikap dan perbuatan yang bersesuaian dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Akan tetapi, pada tataran empiris perilaku hukum bisa berubah menjadi lebih baik, bisa pula berubah menjadi perilaku buruk (menyimpang kaidah hukum). Ini berlaku bagi semua subyek hukum: orang, badan hukum, dan terutama pemegang peran dan proses bekerjanya hukum. Hal ini disebabkan adanya pengaruh faktor internal hukum maupun eksternal hukum.

Tindakan seseorang di dalam masyarakat senantiasa dilakukan dengan memperhitungkan apa yang diharapkan oleh orang lain daripadanya. Dengan demikian tindakan seseorang tidak berdiri sendiri melainkan terangkum dalam suatu jalinan sistem dari peranan yang diharapkan, peranan-peranan yang diharapkan kemudian memaksakan diterima nilai-nilai yang hendaknya diikuti di dalam interaksi sosial oleh anggota masyarakat. Dengan demikian maka peranan yang diharapkan serta nilai-nilai standar itu sedikit banyak menjadi melembaga. Di dalam proses pelebagaan ini maka motivasi

³² rangkuman hasil wawancara dengan masyarakat/pemilik tambak di desa sepuk laut Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu raya

perorangan untuk bertindak lalu dijinakkan keharusan-keharusan untuk memenuhi peranan-peranan yang diharapkan berikut nilai-nilai standarnya.

Dalam kaitanya dengan penegakan hukum terhadap pemanfaatan hutan lindung untuk budidaya tambak di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, maka lembaga-lembaga penegak hukum berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Namun tidak semua keinginan dapat terwujud, artinya dalam melakukan penegakan hukum tidak semua keinginan dapat terealisasi. Sebagaimana telah penulis gambarkan pada bagian terdahulu bahwa penegakan hukum/pengenaan sanksi pidana terhadap pemanfaatan hutan lindung untuk budidaya tambak di desa sepuk laut sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, namun demikian upaya penegakan hukum harus tetap dijalankan.

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap pemanfaatan hutan lindung untuk usaha budidaya tambak di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, antara lain berupa:

1. Aparat penegakan hukum khususnya kepolisian harus segera melakukan proses penegakan hukum yaitu dengan melakukan proses penyidikan kepada orang/petani tambak yang telah memanfaatkan, menduduki kawasan hutan lindung secara tidak sah dan telah menetapkan 58 orang sebagai tersangka;
2. Petugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bersama-sama aparat kepolisian Polda Kalimantan Barat harus segera melakukan pengukuran secara Terestris terhadap semua lokasi tambak yang berada di dalam kawasan hutan lindung desa Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
3. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya melakukan pengumpulan data di lapangan (penelusuran sejarah hutan lindung) termasuk meminta keterangan kepada para petani tambak dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Kubu Raya;
4. Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya harus segera membentuk Tim (TP4L) kemudian Tim bekerja dengan mengumpulkan berbagai data dan fakta di lapangan;
5. Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya harus segera melakukan rapat koordinasi dan melakukan bedah kasus tambak di hutan lindung (mangrove) Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Bupati dan dihadiri oleh Jajaran Dishutbun Kabupaten Kubu Raya, TP4L Kubu Raya, Dishutprov

Kalbar, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kasat III Ops Dit Reskrim Polda Kalbar, petugas kepolisian (penyidik) kasus Desa Sepuk Laut, dan perwakilan masyarakat desa Sepuk Laut.

Dari uraian di atas tergambar adanya upaya yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan kasus secara sungguh-sungguh. Namun upaya tersebut harus didukung oleh semua pihak, sehingga diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah nyata dari aparat untuk secara bersama-sama melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap pemanfaatan hutan lindung untuk usaha budidaya tambak di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Memang selama ini, proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus di bidang kehutanan termasuk pemanfaatan hutan lindung untuk budidaya tambak (udang dan ikan) mengundang silang pendapat dan juga memunculkan saling lempar kesalahan antar instansi yang berwenang/terkait. Fenomena yang demikian, karena ketidaktahuan/tidak memahami mengenai lingkup batas kewenangan masing-masing instansi teknis/terkait.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang kehutanan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas kehutanan mempunyai fungsi antara lain pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam. Sedangkan Dinas Kehutanan Kabupaten Kubu Raya fungsinya antara lain:

1. Menjaga kawasan hutan lindung supaya tidak dirambah,
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran/tindak pidana kehutanan,
3. Fasilitasi pengelolaan hutan lindung tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. Melakukan sosialisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kehutanan, dan
5. Penataan batas bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan.³³

Dari uraian di atas tergambar bahwa institusi kehutanan tingkat provinsi dan kabupaten seperti tersebut di atas memiliki tugas dan fungsi yang cukup besar di kawasan

³³ Rangkuman hasil wawancara dengan Kabid Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dishutprov Kalbar dan aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kubu Raya

hutan lindung termasuk desa Sepuk Laut, seperti melakukan sosialisasi, penataan tata batas, melakukan pembinaan, dan lain sebagainya. Namun tugas dan fungsi tersebut sangat jarang dilakukan, dan bahkan ada masyarakat yang mengatakan bahwa di Sepuk Laut tidak pernah dilakukan sosialisasi sama sekali terkait dengan status hutan lindung di Sepuk Laut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove berdasarkan peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 di pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya tidak berjalan dengan efektif dikarenakan adanya pemanfaatan hutan lindung untuk usaha budidaya tambak tidak memiliki aspek legalitas, karena usaha budidaya tambak tersebut dilakukan di kawasan hutan lindung tanpa terlebih dahulu dilakukan penetapan alih fungsi lahan.
2. Tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove di pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya yaitu dengan melakukan Pemetaan Lokasi Penanaman, melakukan Penyuluhan kepada masyarakat, dan melakukan Kegiatan Monitoring, Control dan Evaluation.
3. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten raya dalam mengatasi permasalahan rehabilitasi hutan mangrove di pulau Betingah Tengah Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya antara lain dengan melakukan berbagai upaya dalam mengumpulkan berbagai data dan fakta, melakukan beda kasus terkait dengan pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan usaha budidaya tambak di desa Desa Sepuk Laut Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya, dan mengadakan berbagai pertemuan dengan berbagai instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya aturan di bidang kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, 1987. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Jakarta : PT. Gramedia Press.
- Amrah Muslimin, 1978. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1978, Bandung : Alumni.
- Bagir Manan, 1990. Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, UNPAD, Bandung.
- Coralie Bryant dan Loise G. White, 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Jakarta : LP3ES.
- Esmi Warassih, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Friedman, Lawrence W. 1984. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York.
- Friedman, Wolfgang, 1971. *The State and The Rule of Law in a Mix Economy*, Steven and Son, London.
- Irawan Soejito, 1984. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Jakarta : Bina Aksara.
- Kadajatmiko, 2009. Implementasi Desentralisasi: Pelajaran dari Pengalaman di Indonesia, Pelajaran Dari **Desentralisasi** Kehutanan Mencari Tata Kelola yang Baik dan Berkeadilan di Asia-Pasifik, Penyunting: *Carol J. Pierce Colfer, Et. Al.* , Bogor : Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan dan Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986. Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung : Binacipta.
- R. Tresna, tt. Bertamasya Ke Taman Ketatanegaraan, Bandung : Dibia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 1996. Ilmu Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban, jakarta : Penerbit UKI Press.
- _____, 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit Kompas.
- _____, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hukum*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Sjachran Basah, 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung : Penerbit Alumni.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif* , Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers.